

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, *et.all*, 2014, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 1985, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indah, C. Maya, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Edisi Kedua*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati (*ed*), 2015, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, USAID, The Asia Foundation.
- Irwanto (*ed*), 2006, *Tanya dan Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, ECPAT International, Bangkok.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.
- , 2018, *Catatan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahun 2017 Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2018, *Laporan Kinerja KPAI – 2017*, KPAI, Jakarta.

Krug, EG *et.al.*, 2002, *World Report on Violence and Health*, World Health Organization, Geneva.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2015, *Laporan Tahunan 2014*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

-----, 2017, *Laporan Tahunan 2016*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

-----, 2018, *Laporan Tahunan 2017*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Napitupulu, Eramus Abraham Todo dan Anggara (ed), *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

Nawawi, Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahmawati, Madina dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Sinaga, Dahlan, 2016, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta.

Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indoneisa, Jakarta.

-----, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indoneisa, Jakarta.

United Nations, 1986, *Seventh United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, United Nations Publication, New York.

Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiryawan, Syahrial Martono dan Melly Setyowati, 2007, *Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3713).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4419).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4720).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5532).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5602).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882)

Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4860).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6131).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6184).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084).

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13)

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 207)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Artikel Jurnal

Ali, Mahrus dan Ari Wibowo, “Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana”, *Yuridika*, Vol. 33, No. 2., Mei 2018.

Aprilianda, Nurini, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2., Agustus 2017.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Kekerasan Seksual Anak Dominan”, *Kesaksian Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban*, Edisi I, 2018.

Marasabessy, Fauzy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-45. No. 1., Januari – Maret 2015.

Noviana, Ivo, 2015, “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penangganya”, *Sosio Informa*, Vol. 01, No. 01.

Rahayu, Sri, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, Februari 2015.

Sibuea, Harris Y.P., “Persoalan Hukum atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana”, *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. IX, No. 21/I/Puslit/November 2017.

Suhariyanto, Budi, “*Quo Vadis* Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Pelaksanaannya)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, Maret 2013.

D. Tugas Akhir

Himawan, Firdaus, 2017, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Setianingrum, Heni, 2018, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sleman*, skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tueka, Navira Araya, 2014, *Restitusi bagi Korban Kejahatan di Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Viktimologis)*, skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Zakiah, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Hal Restitusi di Kota Makassar*, skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

E. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 405/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim, perihal tindak pidana khusus, perkara terdakwa Budi Rachman, 26 Juni 2018.

F. Internet

DPR RI, 2006, “Profil UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006”, <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/69>, diakses tanggal 14 Februari 2019.

-----, 2014, “Profil UU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1617>, diakses tanggal 14 Februari 2019.

-----, 2017, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”, <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, diakses 10 Oktober 2018.

-----, 2017, “Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”, <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>, diakses tanggal 15 September 2018.

ELSAM, 2014 “Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985)”, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Deklarasi-Prinsip-Prinsip-Dasar-Keadilan-Bagi-Korban-Kejahatan-dan-Penyalahgunaan-Kekuasaan-1985.pdf>, diakses tanggal 4 Oktober 2018.

Firmanto, Danang, 2017, “LPSK Keluhkan Minimnya Anggaran yang Membuat Kinerja Tak Maksimal”, <https://nasional.tempo.co/read/890556/lpsk-keluhkan-minimnya-anggaran-yang-membuat-kinerja-tak-maksimal/full&view=ok>, diakses tanggal 17 Februari 2019.

Gerdiansyah, 2018, “Anggaran LPSK Dipangkas Rp10 Miliar”, *Akurat*, <https://akurat.co/news/id-433689-read-anggaran-lpsk-dipangkas-rp10-miliar>, diakses tanggal 17 Februari 2019.

Institute for Criminal Justice Reform, 2017, “Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum”, <http://icjr.or.id/implementasi-pp-restitusi-anak-korban-butuh-kemauan-aparat-penegak-hukum/>, diakses tanggal 8 November.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017, “Press Release Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Siaran Pers Nomor: B-129/Set/Rokum/MP01/11/2017”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1526/restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana>, diakses tanggal 9 September 2018.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017, “15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenal”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, diakses tanggal 30 Agustus 2018.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2017, “Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Perlindungan Anak”,
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/7.RUU%20KS-UU%20PERLINDUNGAN%20ANAK-BAG%207.pdf, diakses tanggal 15 Februari 2019.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2018, “LPSK Sambut Baik Disahkannya PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban”, https://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/2785, diakses tanggal 19 November 2018.

Mahendara, Dero Iqbal, 2018, “Perluasan Jangkauan, LPSK Bentuk Perwakilan Daerah”, Media Indonesia,
<http://mediaindonesia.com/read/detail/156423-perluas-jangkauan-lpsk-bentuk-perwakilan-daerah>, diakses tanggal 17 Februari 2019.

Sembiring, Eidi Krina Jason, 2018, “LPSK: Restitusi dan Kompensasi Jadi Catatan Positif 2017”,
<https://nasional.sindonews.com/read/1272505/12/lpsk-restitusi-dan-kompensasi-jadi-catatan-positif-2017-1515571436>, diakses tanggal 17 Februari 2019.

G. Lain-lain

Committee on The Right of The Child, 2011, *General Comment No. 13 (2011) The Right of The Child to Freedom from All Forms of Violence*, United Nations.

United Nations, *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40 (XXXIII) tanggal 29 November 1985